

ISU KEAMANAN DI SEMENANJUNG KOREA DAN UPAYA DAMAI PARLEMEN

Security Issue in The Korean Peninsula and Parliament's Peace Initiatives

Simela Victor Muhamad

Penulis adalah Peneliti Madya bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional
Pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Alamat email: simela.muhamad@dpr.go.id

Naskah Diterima: 21 Maret 2016

Naskah Direvisi: 3 Mei 2016

Naskah Disetujui: 19 Mei 2016

Abstract

The Korean Peninsula is a strategic region in East Asia, which is still facing security problems because of North Korean nuclear issue, causing concern to surrounding countries. Tensions also often occur due to military maneuvers of that cannot be justified by both countries that are "contrary" each other. Tension on the Korean Peninsula raises international concern due to its implications to regional stability. The unstable situation in the Korean Peninsula could lead to an open conflict, if there is no peaceful means to resolve it. Parliament, as part of the international community, and within the framework of multi-track diplomacy, should actually play a role in supporting peace efforts in the region through parliamentary diplomacy. Through library studies, this essay attempts to discuss parliament's peace efforts on security issues in the Korean Peninsula, especially within the framework of APPF parliamentary diplomacy, based on institutional or individual approach.

Keywords: regional security, parliamentary diplomacy, Korean Peninsula, Asia-Pacific Parliamentary Forum, APPF.

Abstrak

Semenanjung Korea adalah kawasan strategis di Asia Timur yang masih menghadapi persoalan keamanan, akibat isu nuklir Korea Utara yang menimbulkan kecemasan negara-negara di sekitarnya. Ketegangan juga kerap terjadi di kawasan ini akibat aksi manuver militer dari masing-masing negara yang saling 'berlawanan' satu sama lain. Ketegangan di Semenanjung Korea menimbulkan keprihatinan internasional, karena berimplikasi luas terhadap stabilitas kawasan. Situasi keamanan di Semenanjung Korea yang tidak stabil berpotensi menimbulkan konflik terbuka, jika tidak ada upaya damai untuk mengatasinya. Parlemen, sebagai bagian dari masyarakat internasional, dan dalam kerangka diplomasi multi-jalur, seharusnya dapat mengambil peran dalam mendukung upaya damai di kawasan tersebut melalui diplomasi parlemen. Melalui studi kepustakaan, esai ini membahas upaya damai parlemen atas masalah keamanan di Semenanjung Korea, terutama dalam kerangka pelaksanaan diplomasi parlemen APPF, baik yang dilakukan secara kelembagaan maupun individual anggota parlemen.

Kata kunci: keamanan kawasan, diplomasi parlemen, Semenanjung Korea, Forum Parlemen Asia-Pasifik, APPF.

A. Latar Belakang

Isu keamanan di berbagai kawasan dunia yang belum terlihat solusinya menjadi keprihatinan masyarakat internasional, diantaranya isu keamanan di Semenanjung

Korea yang kembali mengemuka belakangan ini. Situasi keamanan di Semenanjung Korea belum sepenuhnya kondusif hingga kini, sebagai akibat dari belum dicapainya kesepakatan damai di antara kedua Korea (Korea Utara dan Korea Selatan),¹ dan isu nuklir Korea Utara

¹ Kedua Korea secara teknis masih dalam keadaan perang setelah Perang Korea 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Don Oberdorfer and Robert Carlin, *The Two Koreas*, New York: Publisher Basic Books, 2014, hal.2-8.

yang belum tuntas, sehingga ketegangan kerap terjadi di kawasan ini. Pada Agustus 2015, misalnya, ketegangan terjadi di kawasan ini yang disebabkan oleh aksi provokatif di antara kedua Korea.² Ketegangan kembali terjadi di Semenanjung Korea menyusul pengumuman Korea Utara yang mengklaim telah berhasil melakukan uji coba bom hidrogen pada minggu pertama Januari 2016.³ Kegiatan latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat yang dilaksanakan pada Maret 2016, dan respons keras Pyongyang atas kegiatan militer gabungan tersebut, menambah ketegangan kawasan Semenanjung Korea.⁴ Ketegangan semakin bertambah ketika Korea Utara, pada 9 Maret 2016, juga mengklaim telah mampu memproduksi bom nuklir berukuran mini, yang bisa ditaruh di hulu ledak dan diluncurkan lewat rudal balistik, yang bisa diarahkan ke Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Korea Selatan, jika konflik terbuka tidak terhindarkan.⁵

Situasi keamanan di Semenanjung Korea yang belum kondusif, dengan segala potensi konfliknya, menjadi keprihatinan masyarakat internasional mengingat implikasinya terhadap stabilitas kawasan, bahkan dunia, jika isu keamanan kawasan tersebut tidak berhasil diatasi. Potensi bagi terjadinya konflik memang tidak bisa diabaikan, jika melihat situasi yang berkembang di kawasan tersebut, di mana para pihak yang “saling berlawanan” (Korea Utara versus Korea Selatan-Amerika Serikat) masih saja melakukan aktivitas manuver militer yang dimaknai sebagai aksi provokasi di antara mereka sendiri. Korea Utara, dengan uji coba

nuklir dan retorika perangnya, adalah salah satu contohnya. Memang ada yang meragukan atas kemampuan nuklir Korea Utara, begitu juga terhadap keseriusan Korea Utara untuk melakukan serangan militer.⁶ Namun, jika memerhatikan respons masyarakat internasional sebagaimana tercermin dari dijatuhkannya sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terhadap Korea Utara dalam bentuk resolusi belakangan ini,⁷ terlihat di sini bahwa masyarakat internasional memandang serius situasi keamanan di Semenanjung Korea yang belum kondusif tersebut. Oleh karena itu, pencarian solusi damai atas isu keamanan kawasan tersebut perlu terus diupayakan oleh masyarakat internasional, termasuk oleh parlemen.

Respons parlemen terhadap persoalan keamanan kawasan tidak dapat dilepaskan dari kedudukannya sebagai lembaga perwakilan rakyat, dan juga sebagai aktor hubungan internasional, yang memang sudah seharusnya memberi perhatian dan menaruh prihatin atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk masyarakat internasional. Ini artinya, parlemen juga harus peduli pada upaya pencarian solusi damai atas persoalan keamanan kawasan dan terciptanya stabilitas keamanan di suatu kawasan. Terciptanya stabilitas keamanan di suatu kawasan akan berkontribusi bagi upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Respons parlemen dalam kerangka mendukung upaya damai atas persoalan keamanan kawasan tersebut dilakukan oleh parlemen melalui aktivitas diplomasi parlemen di forum-forum antar-parlemen. Khusus terkait dengan isu keamanan di Semenanjung Korea, *Asia Pacific Parliamentary Forum* (APPF) adalah forum antar-parlemen yang paling serius membahasnya, di mana isu tersebut telah menjadi bahasan strategis dalam agenda sidang tahunan APPF yang juga membahas isu keamanan kawasan.

² “Tension flare again between two Koreas”, *The Jakarta Post*, 11 Agustus 2015.

³ Bom hidrogen, sejauh ini, merupakan senjata paling merusak yang pernah diciptakan manusia. Bom ini merupakan jenis yang paling kuat dari bom nuklir, dengan kekuatan hingga 25 ribu kali bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. “Mengenal Bom Hidrogen Korut, Kekuatan 25 Ribu Kali Bom Hiroshima”, *Sindonews.com*, 6 Januari 2016, <http://international.sindonews.com/read/1074877/45/mengenal-bom-hidrogen-korut-kekuatan-25-ribu-kali-bom-hiroshima-1452074062> - diakses 8 Januari 2016.

⁴ “North Korea again threatens nuke strikes on US, South Korea”, *The Jakarta post*, 7 Maret 2016.

⁵ “Korut Produksi Nuklir Mini”, *Kompas*, 10 Maret 2016.

⁶ “North Korea’s nuclear programme: How advanced is it?”, *bbc.com.*, 10 Februari 2016, <http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11813699> - diakses 12 Februari 2016.

⁷ “UN sanctions North Koreans for missile, nuclear programs”, *The Jakarta Post*, 3 Maret 2016.

Melalui studi kepustakaan dan penelusuran data atas berbagai bahan bacaan yang relevan (buku, jurnal, surat kabar, dan dokumen tertulis lainnya serta media *online*), tulisan ini mencoba membahas upaya damai parlemen atas masalah keamanan di Semenanjung Korea, terutama dalam kerangka pelaksanaan diplomasi parlemen APPF, baik secara kelembagaan APPF maupun yang dilakukan oleh anggota parlemen secara individual dari negara-negara anggota APPF.

B. Permasalahan

Stabilitas keamanan suatu kawasan merupakan hal penting bagi negara-negara di dunia, khususnya negara-negara di kawasan tertentu di mana terdapat persoalan keamanan kawasan yang cukup mengganggu dan terkandung potensi konflik di dalamnya. Suatu kawasan yang terbebas dari persoalan keamanan merupakan harapan masyarakat internasional dan banyak negara di dunia, karena dengan demikian negara-negara di kawasan tersebut dapat fokus melakukan aktivitas pembangunan negara, dan juga aktivitas hubungan internasionalnya, tanpa terganggu dengan persoalan keamanan kawasan. Kondisi ideal seperti inilah yang belum tampak di kawasan Semenanjung Korea, setidaknya ancaman keamanan masih menjadi persoalan serius negara-negara di kawasan ini.

Situasi keamanan di Semenanjung Korea yang tidak kondusif, jika dibiarkan terus berlarut dan tidak ada upaya damai untuk mengatasinya, berpotensi memunculkan konflik terbuka, dan selanjutnya, akan mengancam stabilitas keamanan dan perdamaian kawasan. Hal ini menjadi tantangan parlemen, sebagai salah satu aktor hubungan internasional, yang sudah seharusnya juga mengambil bagian dalam upaya pencarian solusi damai atas masalah keamanan di Semenanjung Korea melalui diplomasi parlemen. Namun sayangnya, diplomasi parlemen belum terlalu terlihat dalam penanganan masalah keamanan di Semenanjung Korea. Permasalahan dalam tulisan ini adalah, bagaimana diplomasi

parlemen itu dilakukan, khususnya dalam kerangka pelaksanaan diplomasi parlemen APPF (baik secara kelembagaan maupun individual anggota parlemen), dalam penanganan masalah keamanan di Semenanjung Korea? Tulisan hasil kajian ini mencoba membahasnya, dengan terlebih dahulu mengulas situasi keamanan di Semenanjung Korea yang belakangan ini kembali menyita perhatian dunia internasional, khususnya negara-negara di kawasan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Penulisan kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami persoalan seputar diplomasi parlemen, khususnya dalam kerangka APPF dan pelaksanaan tugas anggota parlemen yang tergabung dalam APPF dalam merespons masalah keamanan di Semenanjung Korea. Selain itu, tulisan ini juga ditujukan untuk menambah khasanah kajian terkait diplomasi parlemen, yang masih sangat kurang saat ini, khususnya di kalangan pemerhati hubungan internasional. Tulisan kajian ini, sudah tentu juga, dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan bagi pemerintah dan parlemen (DPR RI), terutama dalam menyikapi persoalan keamanan kawasan. Persoalan keamanan kawasan tidak semata-mata menjadi urusan pemerintah, tetapi juga perlu menjadi perhatian parlemen, sebagai salah satu aktor hubungan internasional, yang juga harus peduli pada upaya penciptaan stabilitas keamanan suatu kawasan.

D. Kerangka Analisis

Upaya damai parlemen dalam tulisan ini dapat dipahami sebagai bagian dari implementasi konsep "*network diplomacy*" (diplomasi berjejaring), salah satu konsep terkait aktivitas diplomasi dalam hubungan internasional yang diperkenalkan oleh Jorge Heine dalam buku *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy*.⁸ Heine menyebutkan bahwa dalam kerangka *network*

⁸ Jorge Heine, "From Club to Network Diplomacy", dalam Andrew F. Cooper, Jorge Heine, and Ramesh Thakur, *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy*, Oxford: Oxford University Press, 2013, hal. 54-69.

diplomacy, aktivitas diplomasi dalam hubungan internasional tidak bergantung pada satu aktor tertentu, seperti yang selama ini dilakukan oleh pihak-pihak kementerian luar negeri (*ministries of foreign affairs/MFAs*) dengan misi politik luar negerinya. Dalam kerangka *network diplomacy*, aktivitas diplomasi dapat dilakukan secara lebih dinamis dan fleksibel, karena aktivitas diplomasi tersebut dibangun melalui jejaring yang lebih cair dan terbuka, tidak saja menyangkut aspek teknisnya (karena dapat dilakukan dengan mengandalkan kemajuan teknologi komunikasi, misalnya), tetapi juga aktor pemain diplomasi itu sendiri yang semakin beragam. Dalam perspektif *network diplomacy*, keterlibatan aktor-aktor diplomasi yang beragam dan luas beserta jejaring dan forum-forum internasional yang dimilikinya, menjadi suatu keniscayaan guna merespons permasalahan dan tantangan hubungan internasional yang semakin kompleks. Ini artinya, permasalahan dan tantangan hubungan internasional yang semakin kompleks tidak cukup direspons oleh satu aktor diplomasi yang secara tradisional dipegang oleh diplomat-diplomat kementerian luar negeri. Jejaring diplomasi harus diperluas, mencakup aktor-aktor lain di luar pemerintah, dan juga melalui forum-forum internasional yang tersedia.

Dalam khasanah hubungan internasional, implementasi lebih lanjut dari *network diplomacy* terlihat dalam aktivitas “diplomasi multi-jalur” (*multi-track diplomacy*). Diplomasi multi-jalur mengidentifikasi bahwa aktivitas diplomasi tidak saja dilakukan oleh diplomat-diplomat pemerintah (eksekutif), tetapi juga dapat dilakukan oleh aktor-aktor lain di luar pemerintah.⁹ Aktor-aktor lain di luar pemerintah, diantaranya adalah parlemen, NGO’s (*Non Government Organizations*), kelompok bisnis, tokoh masyarakat (nasional/internasional) berpengaruh, bahkan warga negara biasa sekalipun, yang menaruh perhatian pada aktivitas diplomasi.¹⁰ Adanya keterlibatan aktor hubungan internasional lain di

luar pemerintah tersebut adalah sejalan dengan tuntutan dan tantangan diplomasi yang semakin kompleks dalam hubungan internasional, di mana dalam menghadapinya tidak cukup bergantung kepada diplomat-diplomat pemerintah, tetapi juga bisa melibatkan aktor-aktor non-pemerintah. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa aktivitas diplomasi dapat dilakukan melalui jejaring diplomasi yang beragam dan luas dari aktor-aktor non-pemerintah. Keterlibatan mereka (aktor-aktor non-pemerintah) dalam aktivitas diplomasi bertujuan untuk mendukung atau memperkuat diplomasi pemerintah, diantaranya yang berkaitan dengan upaya perdamaian dan resolusi konflik.

Parlemen, sebagai salah satu aktor hubungan internasional di luar pemerintah, dan dalam kerangka *network diplomacy*, juga dapat berpartisipasi dalam aktivitas diplomasi tersebut, dikenal sebagai “diplomasi parlemen”, yang dilakukan melalui forum-forum internasional yang tersedia, khususnya forum antar-parlemen, dan juga dengan memanfaatkan jejaring diplomasi yang dimilikinya. Secara konseptual, diplomasi parlemen diartikan sebagai aktivitas diplomasi yang dibangun melalui komunikasi dan interaksi di antara sesama anggota parlemen, sebagai wakil parlemen dari suatu negara, yang bertujuan untuk memperkuat hubungan kerja sama antar-parlemen, antar-negara, dan juga untuk merespons suatu isu internasional yang menjadi perhatian bersama.¹¹ Dalam konteks tulisan ini, situasi keamanan di Semenanjung Korea dapat dikategorikan sebagai isu internasional yang menjadi perhatian bersama. Diplomasi parlemen tersebut dilakukan melalui jejaring parlemen di forum-forum antar-parlemen, yang dalam pertemuan-pertemuannya juga membahas berbagai isu internasional. Isu-isu internasional yang dibahas biasanya juga menjadi agenda pembahasan dalam pertemuan-pertemuan tingkat pemerintah antar-negara.

Isu keamanan kawasan, sebagai salah satu permasalahan internasional, sudah selayaknya

⁹ Louise Diamond, *Multi-Track Diplomacy: A System Approach to Peace*, Bloomfield, USA: Kumarian Press, Inc., 1996, hal. 11-13.

¹⁰ Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi antara Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, hal. 218-219.

¹¹ Frans W. Weisglas and Gonnée de Boer, “Parliamentary Diplomacy”, *The Hague Journal of Diplomacy* 2, 2007, hal. 93-99.

mendapatkan perhatian parlemen, karena ini berkaitan dengan keamanan masyarakat, khususnya masyarakat kawasan. Untuk isu keamanan kawasan biasanya hal itu dibahas di forum antar-parlemen yang secara geopolitik mencakup kawasan tertentu di mana isu keamanan tersebut berimplikasi langsung terhadap kawasan itu. Pembahasan isu keamanan kawasan juga dapat dilakukan di forum antar-parlemen yang lebih luas, jika dalam isu keamanan kawasan tersebut terdapat potensi ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. Di luar forum antar-parlemen, anggota parlemen secara individual, sebagai aktor hubungan internasional,¹² dan melalui jejaring yang dimilikinya, juga dapat melakukan aktivitas diplomasi untuk mendukung upaya damai atas persoalan keamanan kawasan.

Dalam tatanan dunia yang semakin global, kecenderungan yang semakin berkembang adalah anggota parlemen juga mulai berperan dalam proses perwakilan, negosiasi, dan mediasi yang umumnya dahulu menjadi dominasi pemerintah. Adanya beberapa keistimewaan (*privileges*) yang dimiliki anggota parlemen telah menjadi faktor penting yang memberikan alternatif baru dalam praktik diplomasi. Jeffrey Roberston mengidentifikasi keistimewaan tersebut sebagai ketersediaan akses, kemampuan untuk membangun kepercayaan, keleluasaan, dan kesempatan untuk mengeksplorasi suatu isu dari berbagai sisi dan dimensi tanpa menjanjikan komitmen. Akses yang dimaksud di sini adalah dalam kaitan dengan posisi anggota parlemen yang memiliki kemudahan untuk bertemu dengan para pengambil keputusan di negara yang mereka kunjungi. Selain itu, anggota parlemen mendapatkan kepercayaan yang tumbuh dari kenyataan bahwa anggota parlemen dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan mereka di parlemen.¹³ Hal ini dapat menjadi modal dasar

untuk membawa misi-misi diplomatik yang berkaitan erat dengan kepentingan rakyat di suatu negara dan kawasan.

Adanya keistimewaan yang dimiliki parlemen, tidak berarti diplomasi parlemen terlepas dari kritik dan pandangan negatif. Kritik terhadap diplomasi parlemen menyatakan bahwa pemberian kesempatan bagi anggota parlemen untuk memainkan peran diplomasi dalam tataran internasional bertentangan dengan konvensi mengenai otoritas eksekutif dalam politik luar negeri suatu negara. Peranan parlemen dirisaukan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah suatu negara. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan besar parlemen dan pemerintah bersilang pendapat mengenai satu isu global. Selain itu, keterbatasan anggaran yang dimiliki parlemen juga membangkitkan kekhawatiran tentang kemungkinan tidak efektifnya peran advokasi internasional yang dilakukan parlemen.¹⁴ Dalam konteks ini, perlu dijelaskan bahwa selain fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, parlemen sebagai aktor hubungan internasional juga memiliki fungsi diplomasi dalam kerangka berperanserta untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Sementara itu, tidak bisa dielakkan bahwa di tengah-tengah hubungan internasional yang semakin dinamis, sebagai akibat globalisasi, dituntut pelaksanaan diplomasi yang semakin intensif melalui pengaktifan berbagai macam jalur dan jejaring diplomasi yang tersedia.

Ini artinya, sebagai bagian dari *network diplomacy*, parlemen dapat memainkan peranannya dalam proses hubungan internasional, baik itu dalam konteks individual sebagai anggota parlemen maupun secara kelembagaan melalui partisipasi delegasi parlemen di forum-forum antar-parlemen. Di sini parlemen bisa mendorong agar pengembangan hubungan internasional bersifat kooperatif daripada konfliktual. Parlemen juga bisa mendorong agar hubungan internasional dibangun melalui penguatan kerja sama antar-negara, dan dengan mengurangi permasalahan

¹² Andres Malamud and Stelios Stavridis, "Parliaments and Parliamentarians as International Actors", *Ashgate Publishing Ltd.*, www.apps.evi.eu/Personal/Researchers/malamud/Ashgate-Malamud-Stavridis.pdf - diakses 26 Februari 2016.

¹³ Jeffrey Roberston, "North Korean Nuclear Issue and the Role of Parliamentary Diplomacy", *Research Note No. 23*, Australia: Parliamentary Library, 2007.

¹⁴ *Ibid.*

yang berkenaan dengan ketiadaan kepercayaan dan ketakutan satu sama lain di antara negara-negara. Singkatnya, diplomasi parlemen, dengan jejaring diplomasi yang dimilikinya, juga harus ditujukan pada upaya penciptaan iklim kondusif di berbagai kawasan dunia dan dalam hubungan antar-negara. Diplomasi parlemen semacam ini sesungguhnya juga dapat ditujukan untuk merespons situasi keamanan di Semenanjung Korea, di mana telah hadir aktivitas negara-negara dengan *power*-nya, baik dalam kerangka eksistensi negara maupun untuk mendominasi kawasan, yang mengandung potensi konflik dan bisa mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan.

Dalam konteks masalah keamanan di Semenanjung Korea, *network diplomacy* yang dilakukan melalui aktivitas diplomasi parlemen, bisa hadir sebagai bagian dari pencarian solusi damai, yang kini terus diupayakan oleh masyarakat internasional, atas masalah keamanan kawasan tersebut. Sebagai aktor hubungan internasional, parlemen, terutama melalui jejaring anggota parlemen di tingkat internasional dapat melakukan interaksi dan membangun komunikasi politik di antara sesama anggota parlemen, dan juga dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya, untuk membahas langkah-langkah yang bisa dilakukan parlemen dalam mendukung upaya

perdamaian di Semenanjung Korea. APPF, sebagai forum antar-parlemen yang menaruh perhatian pada isu keamanan di Semenanjung Korea, bisa hadir sebagai bagian dari upaya damai parlemen atas masalah keamanan kawasan tersebut.

E. Situasi Keamanan di Semenanjung Korea

Terlebih dahulu menarik untuk diulas secara sekilas perihal situasi keamanan di Semenanjung Korea. Isu keamanan di Semenanjung Korea tidak dapat dilepaskan dari situasi yang melatarbelakanginya, yakni konflik Korea Utara dan Korea Selatan serta isu nuklir Korea Utara yang belum tuntas dan disepakati penyelesaian damainya. Konflik Korea terjadi sebagai implikasi dari pecahnya Korea menjadi dua negara berdaulat setelah Perang Dunia II berakhir, tepatnya pada 1948, ketika Uni Soviet dan Amerika Serikat (dua negara adikuasa yang bersaing pengaruh dan ideologi di Korea) sepakat membagi wilayah Korea menjadi dua, Korea Utara dan Korea Selatan, dengan zona pengawasan yang didemarkasi pada sepanjang 38 derajat lintang utara (lihat Peta Semenanjung Korea di bawah). Pemisahan Korea menjadi dua memang tidak dapat dipisahkan dari konflik ideologi Liberal-Demokratis dan Komunis-Sosialis antara Blok Barat (Amerika) dan Blok

Peta Semenanjung Korea



Sumber: worldatlas.com (www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/)

Timur (Uni Soviet).¹⁵ Hal tersebut kemudian memicu timbulnya ketegangan di antara kedua Korea.

Ketegangan kali pertama terjadi pada 25 Juni 1950 ketika militer Korea Utara menyeberangi perbatasan dan melakukan invasi atas Korea Selatan. Tindakan ini memulai Perang Korea yang berlangsung selama tiga tahun, mengakibatkan lebih dari dua juta orang tewas, merusak infrastruktur dan perekonomian negara, serta meninggalkan keretakan yang lebar di antara sesama orang Korea. Perang Korea berakhir pada 27 Juli 1953 saat Amerika Serikat, China dan Korea Utara menandatangani persetujuan gencatan senjata, dan kedua belah pihak sepakat untuk membuat zona penyangga selebar tiga mil di antara kedua negara, yang kemudian dikenal sebagai Zona Demilitarisasi. Presiden Korea Selatan, Syngman-Rhee, menolak menandatangani persetujuan itu, namun ia berjanji menghormati kesepakatan gencatan senjata.¹⁶ Ini artinya, Perang Korea belum berakhir secara resmi hingga saat ini, dan tidak mengherankan jika kemudian ketegangan masih mewarnai perjalanan hubungan di antara kedua Korea.

Suasana permusuhan memang sangat kuat terlihat di antara kedua Korea dan memengaruhi persepsi masing-masing negara yang melihat tetangganya sebagai musuh dan ancaman. Bagi Korea Utara, Korea Selatan merupakan ancaman dengan kehadiran kekuatan militer Amerika Serikat untuk melindungi Korea Selatan. Bagi Korea Selatan, pengalaman invasi Korea Utara pada waktu Perang Korea, menunjukkan bahwa agresivitas Korea Utara untuk menyatukan Korea merupakan ancaman yang sewaktu-waktu bisa bangkit kembali. Situasi demikian mengakibatkan tidak ada norma yang disepakati untuk mengatur hubungan di antara kedua negara Korea. Terlebih lagi Korea Utara, sejak terpecahnya negara Korea, berubah menjadi sebuah negara yang sangat tertutup, sehingga komunikasi antara Korea

Utara dengan dunia luar, termasuk Korea Selatan, sangat kurang dan dikontrol sangat ketat.¹⁷ Ketegangan pun mewarnai hubungan keduanya. Ketegangan yang dipicu oleh aksi provokasi salah satu pihak terhadap pihak lainnya, ditambah program nuklir Korea Utara yang tidak transparan, telah menimbulkan kecemasan masyarakat internasional karena dianggap dapat mengancam stabilitas dan keamanan kawasan.

Program nuklir Korea Utara yang tidak transparan menjadikan situasi keamanan di Semenanjung Korea tidak menentu. Program pengembangan nuklir Korea Utara dipengaruhi dan didominasi oleh pemikiran Kim Il-sung, dan hal tersebut sudah dilakukan sejak akhir 1970-an. Kim Il-sung, sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara saat itu percaya, bahwa tindakan negaranya ini akan memberikan keuntungan strategis, simbolis, dan teknologi yang dibutuhkan dalam jangka panjang untuk mewujudkan Korea Utara yang kuat dan makmur.¹⁸ Ini bisa diartikan juga bahwa Korea Utara sedang berupaya untuk tidak bergantung pada negara lain (Uni Soviet) dalam melindungi keamanan nasionalnya. Tindakan Korea Utara tersebut menimbulkan kecemasan negara-negara di kawasan, terutama setelah pihak Amerika Serikat, pada pertengahan dekade 1980-an, mengungkapkan adanya pembangunan fasilitas nuklir Korea Utara di Yongbyon dan hal tersebut memberikan kesempatan Korea Utara untuk memproduksi plutonium yang diperlukan bagi hulu ledak nuklir.

Pada tahun 1990-an, ancaman nuklir Korea Utara semakin meningkat dengan penarikan diri Korea Utara dari perjanjian non-proliferasi nuklir pada bulan Maret 1993. Masa ini juga ditandai dengan meninggalnya Kim Il-sung pada tahun 1994 yang kemudian posisinya digantikan oleh Kim Jong-il, putra sulung Kim Il-sung, yang ternyata juga memiliki keinginan besar untuk mengembangkan program nuklir. Program nuklir

¹⁵ Don Oberdorfer and Robert Carlin, *Op.cit.*, hal. 12-13.

¹⁶ Bruce Cumings, *The Korean War: A History*, Modern Library Paperback Edition, 2011, hal. 1-36.

¹⁷ Hyung Gu Lynn, *Bipolar Orders: The Two Koreas Since 1989*, Canada: Fernwood Publishing, 2007, hal. 154-171.

¹⁸ Clement Walter C., Jr., "North Korea's Quest for Nuclear Weapons: New Historical Evidence", *Journal of East Asian Studies*, Vol. 10, No. 1, Januari-April 2010.

Korea Utara tersebut bertujuan, antara lain:¹⁹ 1) meningkatkan kekuatan untuk mencapai posisi setara dengan Korea Selatan, 2) menambah kewibawaan dan pengaruh Korea Utara dalam hubungan antar-negara di dunia, 3) sebagai strategi penyeimbang terhadap persenjataan Korea Selatan. Sementara itu secara politis, nuklir (khususnya senjata nuklir) memberikan Kim Jong-il prestise dan daya tawar dalam menghadapi komunitas internasional, selain sebagai alat untuk mempertahankan rezim yang dapat memperluas dukungan domestik dan penangkal potensial dalam menghadapi ancaman-ancaman luar. Sejak tidak adanya jaminan keamanan dari Uni Soviet pasca Perang Dingin, Pyongyang merasa harus memperoleh jaminan keamanan dari akuisisi senjata nuklirnya sendiri.

Pada tahun 1998, misalnya, Korea Utara telah merancang dua misil jarak jauh yang dapat mencapai sebagian wilayah Amerika Serikat dan Jepang. Program misil ini mengundang perhatian serius akan cita-cita nuklir Korea Utara karena *intercontinental ballistic missile* (ICBM) tidak akan berarti apa-apa tanpa hulu ledak nuklir. Isu ini muncul pada 31 Agustus 1998 ketika Korea Utara meluncurkan salah satu misilnya dengan jangkauan jelajah 1700-2200 km yang melewati wilayah Jepang dan mendarat di bagian barat Hawaii, di Samudera Pasifik.²⁰ Melihat keadaan ini bukan hanya Amerika Serikat dan Jepang saja yang merasa terancam tetapi seluruh negara yang berada di Asia Timur merasa harus memperkuat sistem pertahanan agar tidak menjadi sasaran rudal Korea Utara. Kekhawatiran semakin meningkat ketika Korea Utara secara resmi tidak menyangkal pernyataan asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, James A. Kelly, yang menyatakan bahwa Pyongyang memiliki program senjata nuklir.²¹

¹⁹ Kim Il-su, "Kim Jong-il and Denuclearization of the Korean Peninsula", dalam Tae-Hwan Kwak and Seung-Ho Joo (eds), *North Korea's Foreign Policy Under Kim Jong-il*, Ashgate Publishing Company, 2009, hal. 81-96.

²⁰ "North Korea fire missile over Japan", *The Guardian*, 1 September 1998, www.theguardian.com/world/1998/sep/01/northkorea - diakses 6 Januari 2016.

²¹ "North Korea says it has a program on nuclear arms", *The New York Times*, 17 Oktober 2002, www.nytimes.com/2002/10/17/world/ - diakses 6 Januari 2016.

Terlihat di sini bahwa selain konflik antar-Korea yang belum tuntas, pengembangan program misil dan nuklir Korea Utara menjadi pemicu bagi timbulnya ketegangan di Semenanjung Korea dan kekhawatiran negara-negara di kawasan. Hal tersebut segera saja mendorong negara-negara di kawasan, terutama yang memiliki kepentingan langsung dengan keamanan di Semenanjung Korea, mengajak Korea Utara untuk berunding guna membicarakan program nuklirnya. Melalui perundingan multilateral enam pihak, yang dikenal sebagai *Six Party Talks* (yang melibatkan China, Amerika Serikat, Rusia, Jepang, Korea Utara, dan Korea Selatan), program nuklir Korea Utara dibahas guna dicarikan solusi damainya. Namun sayangnya, perundingan multilateral yang dilaksanakan sejak 2003 dan telah berlangsung beberapa kali putaran tersebut belum berhasil membuahkan kesepakatan dan terhenti sejak 2008.²² Amerika Serikat, salah satu negara peserta perundingan, menolak memulai kembali perundingan kecuali Korea Utara menghentikan program nuklirnya terlebih dahulu. Sedangkan Korea Utara menilai, sikap "permusuhan" Amerika Serikat merupakan ganjalan utama untuk memulai kembali perundingan.

Terhentinya perundingan enam pihak secara tidak langsung memberi ruang bagi Korea Utara untuk terus mengembangkan program nuklir dan juga melakukan uji coba peluncuran misil atau rudalnya. Peluncuran roket jarak jauh (Unha-2) yang dilaksanakan pada bulan April 2009, misalnya, menandai kemampuan rudal balistik antar-benua. Kendati pihak Korea Utara menegaskan bahwa peluncuran roket itu hanya bertujuan untuk keperluan penempatan satelit komunikasi pada orbitnya, namun beberapa ahli menilai teknik roket itu dapat diterapkan dalam pengembangan rudal balistik yang mampu menjangkau sejauh 3.100 km.²³ Terhentinya

²² "The Six Party Talks on North Korea's Nuclear", *Council on Foreign Relations*, 30 September 2013, www.cfr.org/proliferation/six-party-talks-north-koreas-nuclear-program/ - diakses 7 Januari 2016.

²³ "North Koreans Launch Rocket Over the Pacific", *The New York Times*, 4 April 2009, www.nytimes.com/2009/04/05/world/ - diakses 7 Januari 2016.

perundingan enam pihak juga berimplikasi pada hubungan antar-Korea yang tidak kondusif, bahkan sempat memanas terutama setelah kapal Korvet Angkatan Laut Korea Selatan, yang bernama Cheonan, tenggelam pada Maret 2010 yang diklaim Seoul telah ditorpedo oleh kapal selam Korea Utara.²⁴

Berkuasanya Kim Jong-un pada 2012, setelah ayahnya Kim Jong-il meninggal pada 2011, tidak membuat Korea Utara surut untuk mengembangkan program nuklir dan melakukan uji coba peluncuran rudal. Pada bulan Desember 2012 Korea Utara kembali melakukan peluncuran roket (Unha-3), dengan alasan untuk keperluan penempatan satelit komunikasi, namun komunitas internasional mengidentifikasi aksi Korea Utara tersebut sebagai tindakan provokatif dan uji coba terselubung rudal balistik.²⁵ Komunitas internasional juga menilai aksi Korea Utara tersebut telah melanggar resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB, resolusi 1874 tahun 2009, yang antara lain melarang Korea Utara untuk melakukan uji coba peluncuran rudal balistik. Selanjutnya, pada Mei 2013, sedikitnya tiga rudal jarak pendek diluncurkan dalam latihan militer yang digelar di wilayah pesisir pantai timur Korea Utara.²⁶ Korea Utara menyebut peluncuran rudal tersebut sebagai respons atas pelaksanaan latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat di Semenanjung Korea. Latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat, yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun tersebut, kerap disikapi negatif oleh Korea Utara. Kim Jong-un menyebut latihan militer gabungan tersebut secara tidak langsung merupakan deklarasi perang. Hal tersebut kembali diucapkan Jong-

un ketika menyikapi latihan militer gabungan Korea Selatan-Amerika Serikat di Semenanjung Korea, Juli-Agustus 2015, sehingga ketegangan kembali terjadi di Semenanjung Korea.

Ketegangan semakin menjadi pada bulan Agustus 2015 ketika dua tentara Korea Selatan yang sedang berpatroli di zona demiliterisasi terkena ledakan ranjau darat.²⁷ Seoul menuduh Pyongyang telah meletakkan ranjau darat, namun Pyongyang membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa tuduhan Seoul hanya propaganda untuk kembali menyudutkan Pyongyang. Sebagai respons atas tuduhan Korea Selatan, Kim Jong-un memerintahkan pasukan Korea Utara untuk menempati garis depan perbatasan dalam situasi "semi perang".²⁸ Sementara itu, Korea Selatan juga telah menempatkan militernya dalam siaga tinggi dan siap membalas setiap jenis serangan dari Utara.²⁹ Eskalasi ketegangan semakin bertambah ketika kedua Korea juga melakukan aktivitas uji coba peluncuran rudal dan melakukan aksi-reaksi atas tindakan provokasi salah satu pihak di perbatasan.

Pada minggu pertama bulan Januari 2016 dunia internasional kembali dikejutkan oleh klaim Korea Utara yang menyatakan bahwa negaranya telah berhasil melakukan uji coba bom hidrogen.³⁰ Data yang dikeluarkan US Geological Survey (USGS) menyebutkan bahwa sebuah gempa bumi berkekuatan 5,1 skala richter (SR) terdeteksi di lokasi sekitar 19 kilometer dari Sungjibaegam, tempat uji coba nuklir Korea Utara, di kedalaman 10 kilometer. Penyebab gempa tersebut tidak diketahui, namun muncul dugaan bahwa gempa itu terkait dengan aktivitas uji coba nuklir. Sebuah gempa bumi berkekuatan 4,9 SR pernah terjadi di lokasi yang sama pada 2013, sebelum uji coba

²⁴ "North Korean torpedo sank Cheonan, South Korea military source claims", *The Guardian*, 22 April 2010, <http://www.theguardian.com/world/2010/apr/22/north-korea-cheonan-sinking-torpedo> - diakses 20 Januari 2016.

²⁵ "North Korea rocket launch raises nuclear stakes", *Reuters*, 12 Desember 2012, www.reuters.com/article/us-korea-north-rocket/ - diakses 7 Januari 2016.

²⁶ "North Korea fires three short-range missiles into eastern waters", *The Guardian*, 18 Mei 2013, www.theguardian.com/world/2013/may/18/north-korea-fires-scud-missile - diakses 7 Januari 2016.

²⁷ "S Korea to resume propaganda war with North after mine blasts", *The Jakarta Post*, 10 Agustus 2015.

²⁸ "Kim Jong-un orders North Korean frontline troops onto war footing", *The Telegraph*, 21 Agustus 2015, www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/ - diakses 7 Januari 2016.

²⁹ "S. Korea shells North after rocket attack", *The Jakarta Post*, 20 Agustus 2015.

³⁰ "North Korea's nuclear test strongly opposed: China", *The Jakarta Post*, 7 Januari 2016.

nuklir ketiga Korea Utara di lokasi itu.³¹ Uji coba terbaru yang mengejutkan itu diperintahkan secara langsung oleh pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, yang menegaskan bahwa uji coba nuklir itu merupakan peringatan bagi Amerika Serikat.³² Sejumlah negara, termasuk China, Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat, mengecam aksi Korea Utara tersebut. Dewan Keamanan PBB segera menggelar rapat darurat guna membahas aksi militer negara pimpinan Kim Jong-un itu.

Uraian sekilas perihal situasi keamanan yang melatarbelakangi kawasan Semenanjung Korea di atas memperlihatkan bahwa keamanan di Semenanjung Korea belum kondusif hingga saat ini. Dunia internasional masih sering menyaksikan ketegangan terjadi di kawasan tersebut. Berbagai upaya memang telah dilakukan untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi damai di Semenanjung Korea, baik dalam kerangka solusi damai antar-Korea (melalui program reunifikasi) maupun terhadap isu nuklir Korea Utara (melalui perundingan enam pihak). Namun upaya damai tersebut selalu kandas di tengah jalan, karena ketidakpercayaan masih kuat menghinggapi para pihak yang saling “berlawanan”, seperti antara Korea Utara dan Korea Selatan, dan antara Korea Utara dan Amerika Serikat. Tidak mengherankan jika kemudian aktivitas propaganda dan retorika bernada permusuhan di antara mereka terus berlangsung, begitu juga dengan aktivitas manuver militer, sebagaimana yang terjadi belakangan ini. Kemungkinan pecah perang baru di antara kedua Korea pun kembali menjadi kekhawatiran dunia. Ditambah lagi, Korea Utara memiliki senjata nuklir dan rezim di Pyongyang bisa saja melakukan tindakan tidak terduga.

E. Upaya Damai Parlemen

Situasi keamanan di Semenanjung Korea sudah tentu perlu mendapat perhatian

parlemen, setidaknya hal itu menjadi bagian dari agenda sidang forum antar-parlemen, khususnya ketika membahas isu keamanan kawasan. Dalam sidang-sidang forum antar-parlemen, dibahas sejumlah isu aktual dan/atau strategis yang menjadi perhatian masyarakat internasional, dan biasanya hal itu juga menjadi perhatian fora internasional di lingkup pemerintah antar-negara. Ini artinya, parlemen juga harus peduli dan menaruh perhatian atas isu-isu aktual dan/atau strategis yang menjadi perhatian masyarakat internasional, yang mana hal ini juga dimaksudkan untuk memperkuat upaya pemerintah dalam merespons isu-isu aktual dan/atau strategis tersebut. Dengan demikian, antara parlemen dan pemerintah terbangun sinergitas dalam upaya mencari solusi atas suatu permasalahan internasional. Upaya itu dilakukan sesuai dengan kapasitas dan melalui jalur diplomasi masing-masing. Situasi keamanan di Semenanjung Korea sudah tentu merupakan isu keamanan kawasan yang perlu direspons dan diupayakan solusinya.

Upaya damai parlemen atas isu keamanan di Semenanjung Korea, sebagaimana dikemukakan di atas, dilakukan melalui forum antar-parlemen, dan APPF sejauh ini menjadi forum antar-parlemen yang paling serius menyikapinya. Hal ini terlihat dari seringnya isu keamanan kawasan tersebut dibahas dalam sidang tahunan APPF.³³ Dibahasnya isu keamanan di Semenanjung Korea oleh APPF adalah sangat lumrah, mengingat organisasi antar-parlemen yang secara resmi dibentuk pada 1993 di Tokyo, dan beranggotakan 27 parlemen nasional negara-negara Asia Pasifik (lihat tabel di bawah), yang di dalamnya juga mencakup parlemen negara-negara Asia Timur, di mana situasi keamanan di Semenanjung Korea bersentuhan langsung dengan kepentingan nasional mereka. Oleh karena itu pula, tidak mengherankan jika kemudian APPF, dengan jejaring diplomasi parlemen yang dimilikinya, menjadi forum antar-parlemen yang paling serius membahas

³¹ “Korea Utara Umumkan Sukses Uji Coba Bom Hidrogen”, *Kompas*, 6 Januari 2016.

³² “North Korea says nuclear test shows it could ‘wipe out’ US”, *The Jakarta Post*, 14 Januari, 2016.

³³ “Asia Pacific Parliamentary Forum: Annual Meetings”, www.appf.org.pe/ - diakses 18 Januari 2016.

isu keamanan di Semenanjung Korea, terutama ketika ketegangan kembali terjadi di kawasan tersebut. Pembahasan di forum APPF tersebut sudah tentu juga dimaksudkan sebagai bagian dari upaya untuk mencari solusi damai atas masalah keamanan di Semenanjung Korea. Dalam kerangka APPF, anggota parlemen secara individual dari parlemen negara-negara anggota APPF juga dapat melakukan aktivitas diplomasi sebagai kelanjutan komitmen APPF terhadap isu keamanan di Semenanjung Korea.

Tabel
Daftar Negara-negara Anggota APPF

01	Amerika Serikat	15	Kosta Rika
02	Australia	16	Laos
03	Chili	17	Malaysia
04	China	18	Meksiko
05	Ekuador	19	Mikronesia
06	Fiji	20	Mongolia
07	Filipina	21	Papua Niugini
08	Indonesia	22	Peru
09	Jepang	23	Rusia
10	Kamboja	24	Singapura
11	Kanada	25	Selandia Baru
12	Kepulauan Marshall	26	Thailand
13	Kolombia	27	Vietnam
14	Korea Selatan		

Sumber: <http://www.appf.org.pe/>

Jika merujuk ke belakang, APPF, yang digagas pendiriannya oleh mantan Perdana Menteri Jepang Yasuhiro Nakasone dan secara resmi dibentuk pada 1993 melalui Deklarasi Tokyo, bertujuan untuk: memberikan kesempatan kepada parlemen-parlemen dari kawasan Asia Pasifik untuk mengidentifikasi dan membahas isu-isu yang telah menjadi masalah bersama dan menjadikannya ke dalam konteks global; mendalami pengertian kebijakan, kepentingan, dan bertukar pengalaman di masing-masing parlemen di masing-masing negara di kawasan; melihat perkembangan-perkembangan sosial, politik dan budaya yang berasal dari integrasi dan pertumbuhan ekonomi; menggalang dan memperkuat kerja

sama regional di semua tingkatan pada hal-hal yang menjadi kepentingan bersama di kawasan; dan mendorong masing-masing parlemen untuk memainkan peranannya dalam memperkuat persatuan, kerja sama dan pengertian regional.³⁴ Ini artinya, APPF berkepentingan menggalang dan memperkuat kerja sama regional, yang diarahkan pada upaya untuk mencapai kemajuan pada isu perdamaian, kebebasan, demokrasi, dan kemakmuran, sebagai dasar untuk menjamin keamanan dan perdamaian regional.

Dalam kerangka itu pula, APPF berkepentingan menjaga stabilitas keamanan kawasan, dan pada saat yang bersamaan harus mengkritisi dinamika dan situasi keamanan kawasan yang berkembang, seperti halnya yang terjadi di Semenanjung Korea. Kawasan Semenanjung Korea merupakan daerah rawan konflik, terutama terkait dengan perseteruan Korea Utara dan Korea Selatan, yang hingga kini masih terus berlangsung dan belum terlihat solusi damainya. Belum lagi isu nuklir Korea Utara, yang dianggap tidak transparan oleh masyarakat internasional dan dikendalikan oleh rezim otoriter di Pyongyang, telah menimbulkan kecemasan negara-negara di kawasan. Jika salah satu pihak tidak dapat menahan diri, bukan mustahil perang nuklir berpotensi untuk terjadi di kawasan ini. Perang nuklir jelas merupakan ancaman bagi keamanan internasional. Ketegangan yang terjadi di Semenanjung Korea memang tidak hanya dirasakan di negara-negara tetangga atau kawasan di sebelahnya, namun juga bisa memancing timbulnya konflik dan peperangan di kawasan yang jauh dari Korea Utara dan Korea Selatan, karena adanya kepentingan geostrategis negara-negara di kawasan dan garis politik yang “terhubung” di antara mereka. Situasi keamanan di Semenanjung Korea yang tidak kondusif ini pula yang menjadi keprihatinan APPF dan mendapat perhatian khusus anggota parlemen dalam sesi sidang yang membahas isu keamanan kawasan.

³⁴ BKSAP, *Diplomasi DPR: Dari Senayan ke Kancah Global*, BKSAP-DPR RI, 2009, hal. 141-142.

Di forum APPF, khususnya dalam sesi sidang yang membahas isu keamanan di Semenanjung Korea, para anggota parlemen tidak saja menyampaikan pandangan-pandangan kritisnya atas situasi yang terjadi di Semenanjung Korea, tetapi juga menyampaikan pandangan-pandangan tentang pentingnya penguatan kerja sama internasional dalam mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea. Bagi parlemen, sebagai representasi rakyat, solusi damai atas persoalan yang terjadi di Semenanjung Korea, baik itu terkait dengan konflik Korea Utara dan Korea Selatan maupun isu nuklir Korea Utara, penting untuk terus diupayakan karena hal ini juga terkait dengan kepentingan dan kelangsungan hidup rakyat, tidak saja rakyat di kedua Korea (Korea Utara dan Korea Selatan), tetapi juga rakyat di negara-negara kawasan. Pandangan parlemen seperti itu begitu mengemuka dalam sidang APPF, karena kehadiran mereka di forum antar-parlemen tidak saja sekedar mewakili rakyat dari negaranya, tetapi juga menyuarakan kepentingan rakyat negara-negara kawasan.³⁵ Melalui aktivitas diplomasi parlemen, antar-sesama anggota parlemen saling berinteraksi untuk memadukan, merumuskan, dan menuangkan pandangan-pandangan yang mengemuka dan berkembang dalam sidang ke dalam sebuah resolusi sebagai sikap resmi parlemen.

Dalam Sidang Tahunan ke-22 APPF di Puerto Vallarta, Meksiko, 12-16 Januari 2014, misalnya, dihasilkan resolusi yang berjudul "*The Situation on the Korean Peninsula*".³⁶ Pada saat itu, APPF menyikapi secara kritis situasi keamanan di Semenanjung Korea yang belum juga menunjukkan tanda-tanda ke arah perdamaian, bahkan sebaliknya aktivitas manuver militer kedua negara Korea yang masih dalam status "berperang" tersebut

semakin meningkat, terutama diperlihatkan militer Korea Utara di bawah instruksi langsung Kim Jong-un. Situasi di Semenanjung Korea yang tidak kondusif tersebut dalam pandangan APPF merefleksikan belum berhasilnya upaya diplomasi di kawasan ini, salah satu indikasinya adalah terhentinya perundingan multilateral enam pihak. Kerja sama regional dan internasional yang coba dibangun saat itu, utamanya untuk mendiskusikan program nuklir Korea Utara, juga tidak mendapat respons positif Pyongyang. Situasi inilah yang kemudian mendorong APPF mengeluarkan resolusi tersebut. Dalam kerangka upaya damai parlemen, melalui resolusi ini, APPF menghimbau negara-negara anggotanya untuk memperkuat diplomasi parlemen di tingkat multilateral guna mendukung terwujudnya stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Asia-Pasifik.

Kesungguhan APPF dalam menyikapi isu keamanan di Semenanjung Korea juga dilakukan dalam Sidang Tahunan ke-23 APPF di Quito, Ekuador, 10-15 Januari 2015. Di sidang ini dihasilkan resolusi berjudul "*Achieving Denuclearization and Peace on the Korean Peninsula*".³⁷ Melalui resolusi tersebut, parlemen menegaskan kembali pentingnya kerja sama regional dan internasional dalam mempromosikan perdamaian di Semenanjung Korea, khususnya dengan mengajak negara-negara anggota APPF untuk secara bersama-sama mengawal dan mewujudkan Semenanjung Korea sebagai kawasan yang terbebas dari kehadiran senjata nuklir, yang tidak saja penting bagi stabilitas dan perdamaian di Semenanjung Korea, tetapi juga kawasan Asia Pasifik. Melalui resolusi ini, APPF juga meminta Korea Utara untuk mematuhi resolusi-resolusi DK PBB dan meninggalkan program senjata nuklirnya, termasuk aktivitas pengayaan uranium dan program rudal balistik,

³⁵ Park Hyung-sik, "Parliamentary diplomacy and Korean Peninsula stabilities", *The Jakarta Post*, 16 Januari 2015.

³⁶ "Resolution on the Situation on the Korean Peninsula", *22nd Annual Meeting Asia Pacific Parliamentary Forum*, http://www.appf.org.pe/meeting/twenty-second/resolutions/APPF22_RES-06.pdf - diakses 18 Januari 2016.

³⁷ "Resolution on Achieving Denuclearization and Peace on the Korean Peninsula", *23rd Annual Meeting Asia Pacific Parliamentary Forum*, <http://www.appf.org.pe/meeting/twenty-third/resolutions/23appfec-01-achieving-denuclearization-and-peace-on-the-korean-peninsula.pdf> - diakses 18 Januari 2016.

secara menyeluruh. APPF juga mendorong untuk kembali diselenggarakannya proses perundingan multilateral enam pihak sebagai langkah penyelesaian damai yang paling efektif dalam mengatasi isu nuklir Korea Utara. Dalam konteks ini, APPF meminta komunitas internasional, termasuk di dalamnya anggota parlemen negara-negara APPF, untuk juga aktif melakukan promosi damai atas masalah keamanan di Semenanjung Korea.

Penegasan sikap parlemen atas pentingnya stabilitas dan perdamaian di Semenanjung Korea kembali ditegaskan dalam Sidang Tahunan ke-24 APPF di Vancouver, Kanada, 17-21 Januari 2016, melalui resolusi “*Promoting Peace on the Korean Peninsula and Improving Inter-Korean Relations*”.³⁸ Perdebatan seputar aksi Korea Utara yang berkali-kali melakukan uji coba nuklir menjadi isu yang menonjol dan mendapatkan perhatian dari hampir semua peserta sidang APPF di Vancouver, termasuk dari delegasi parlemen China yang selama ini dikenal dekat dengan Korea Utara.³⁹ Resolusi APPF yang dihasilkan di Vancouver, Kanada, tersebut merupakan respons langsung parlemen terhadap aksi provokatif Korea Utara yang kembali melakukan uji coba nuklir pada minggu pertama bulan Januari 2016. Hal ini menunjukkan bahwa isu nuklir Korea Utara perlu dikritisi dalam kerangka terjaganya stabilitas kawasan, dan parlemen juga mempunyai tanggung jawab untuk ikut memperjuangkannya melalui aktivitas diplomasi parlemen dan jejaring yang dimilikinya di tingkat regional dan internasional. Memang parlemen Korea Utara tidak menjadi bagian dari peserta sidang APPF, tetapi kehadiran dari hampir semua parlemen negara-negara Asia Pasifik di forum ini sudah menjadi kekuatan yang cukup untuk membangun jejaring diplomasi dan mendorong pemerintah negara masing-masing agar lebih

intensif lagi mengupayakan perdamaian di Semenanjung Korea melalui proses dialog dan perundingan.

Terkait dengan isu nuklir Korea Utara, APPF kembali menegaskan bahwa hal tersebut perlu untuk dibicarakan kembali secara lebih terbuka melalui proses dialog enam pihak (*six party talks*), yang melibatkan dua Korea (Korea Utara dan Korea Selatan), China, Rusia, Jepang, dan Amerika Serikat. Diakui bahwa upaya untuk membicarakan isu Nuklir Korea Utara dengan rezim Pyongyang yang otoriter dan tertutup adalah tidak mudah, tetapi upaya itu tetap harus dilakukan melalui jalur diplomasi berjejaring (*network diplomacy*). APPF telah membuka ruang bagi terjadinya interaksi dan aktivitas diplomasi antar-parlemen, dan sejauh ini telah dimanfaatkan dengan baik oleh para anggota parlemen yang berpartisipasi di forum ini untuk membangun kesamaan pandangan dalam menyikapi situasi keamanan di Semenanjung Korea, sebagaimana tertuang dalam resolusi APPF di atas. Di forum APPF, di sela-sela sidang, para anggota parlemen juga saling berinteraksi satu sama lain dan melakukan pertemuan-pertemuan secara bilateral guna mendiskusikan langkah-langkah lanjutan yang perlu dilakukan APPF untuk mendukung upaya damai di Semenanjung Korea.⁴⁰ Langkah-langkah lanjutan yang perlu dilakukan APPF, diantaranya, adalah dengan mendorong para anggota parlemen negara-negara APPF untuk senantiasa aktif mempromosikan upaya damai di Semenanjung Korea di berbagai forum internasional.

Langkah lanjutan APPF untuk mempromosikan dan mengawal upaya damai parlemen atas masalah keamanan di Semenanjung Korea, diantaranya, terlihat di forum *Inter-Parliamentary Union (IPU)*, Maret 2014. Di forum IPU tersebut, para anggota parlemen yang berasal dari negara-negara APPF secara berjejaring melakukan penggalangan sikap yang lebih luas lagi terkait upaya damai di Semenanjung Korea, karena forum ini beranggotakan parlemen-parlemen nasional

³⁸ “Resolution on Promoting Peace on the Korean Peninsula and Improving Inter-Korean Relations”, 24th Annual Meeting Asia Pacific Parliamentary Forum, https://conferencesparl.ca/APPF24FPAP/documents/final-resolutions/APPF_Res_19_Final - diakses 25 Januari 2016.

³⁹ APPF Newsletter, Januari 2016.

⁴⁰ *Ibid.*

dari hampir seluruh negara di dunia. Para anggota parlemen negara-negara APPF, dengan jejaring diplomasi yang dimilikinya, berupaya mengangkat isu keamanan di Semenanjung Korea dalam konteks keamanan global.⁴¹ Ini artinya, isu keamanan di Semenanjung Korea tidak dapat dipisahkan dari kepentingan masyarakat internasional yang berkeinginan menyaksikan seluruh kawasan di dunia terbebas dari ancaman konflik antar-negara, termasuk di dalamnya terbebas dari ancaman senjata nuklir. Dalam konteks inilah, para anggota parlemen yang tergabung dalam APPF menyiasati isu keamanan di Semenanjung Korea di forum IPU dengan mendukung terbitnya resolusi IPU yang berjudul: “*Towards A Nuclear-Weapon Free World: The Contributions of Parliaments*”.⁴² Resolusi yang dihasilkan Sidang ke-130 IPU di Jenewa, Swiss, Maret 2014, tersebut memuat harapan parlemen akan situasi dunia yang bebas dari ancaman senjata nuklir. Keberadaan program senjata nuklir Korea Utara jelas bertentangan dengan harapan parlemen, dan juga harapan masyarakat internasional, yang sangat berharap seluruh kawasan di dunia terbebas dari ancaman senjata nuklir.

Anggota parlemen negara-negara APPF, yang juga aktif di forum *Parliamentarians for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament* (PNND), bahkan lebih tegas lagi menyikapi isu keamanan di Semenanjung Korea, terutama terkait dengan program senjata nuklir Korea Utara. Mereka secara tegas mengecam aksi Korea Utara yang telah berulang kali melakukan uji coba nuklir, termasuk uji coba nuklir yang dilakukan pada awal Januari 2016, yang diklaim Korea Utara sebagai bom hidrogen. Mereka berpandangan, pengembangan program senjata nuklir Korea Utara telah memunculkan persaingan di antara negara-negara pemilik senjata nuklir di kawasan (yang mencakup China, Rusia, Amerika Serikat, dan Korea Utara), dan semakin menambah situasi

keamanan di Semenanjung Korea tidak aman.⁴³ Natalia Diaz Quintana, anggota parlemen Kosta Rika, yang juga aktif di APPF dan PNND, bahkan menyebutkan bahwa uji coba nuklir sebagaimana yang dilakukan Korea Utara dapat mendorong terjadinya perang nuklir, dan oleh karena itu, organisasi internasional seperti PBB harus berupaya untuk mencegah krisis nuklir ini tidak berkembang karena implikasinya tidak saja akan merusak stabilitas kawasan tetapi juga menghancurkan planet bumi.⁴⁴

Sebagian besar peserta sidang APPF di Vancouver (Kanada), Januari 2016, sesungguhnya juga telah menyampaikan pandangan kritisnya terhadap isu nuklir Korea Utara, terutama terhadap aksi uji coba bom hidrogen. Terlepas dari uji coba nuklir Korea Utara itu berhasil atau tidak, jika klaim Korea Utara itu benar bahwa uji coba yang dilakukan pada awal Januari 2016 adalah bom hidrogen, maka hal itu sangat jelas merupakan ancaman senjata nuklir tingkat tinggi. Oleh karena itu, APPF kembali menegaskan perlunya memperkuat langkah-langkah diplomasi dan kerja sama internasional yang lebih nyata untuk mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea.⁴⁵ Ini artinya, masyarakat internasional tidak membutuhkan retorika, tetapi lebih membutuhkan aksi nyata untuk mencegah dan menghentikan pengembangan senjata nuklir melalui kesepakatan internasional yang mengikat dan dipatuhi bersama oleh negara-negara di dunia.

APPF, melalui jejaring anggota parlemen di berbagai negara, tampaknya telah dan terus berupaya membangun komitmen internasional akan pentingnya stabilitas keamanan dan perdamaian di Semenanjung Korea. Dalam perspektif APPF, ketegangan dan konflik yang terjadi di Semenanjung Korea, jika tidak teratasi, terlebih lagi dengan adanya isu senjata nuklir, akan

⁴¹ APPF Newsletter, Maret 2014.

⁴² “IPU Assembly Resolutions”, www.ipu.org/strct-e/scnfres.htm/#132 – diakses 18 Januari 2016.

⁴³ “Parliamentarians and the North Korean nuclear test”, *Parliamentarians for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament* (PNND), 10 Januari 2016, www.pnnd.org/article/parliamentarians-and-north-korean-nuclear-test - diakses 18 Januari 2016.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ APPF Newsletter, Januari 2016.

memiliki dampak yang luas, tidak saja terhadap situasi keamanan di Semenanjung Korea, tetapi juga keamanan kawasan Asia Pasifik secara keseluruhan. Hal ini menjadi perhatian APPF, sebagai organisasi antar-parlemen di kawasan, yang sudah seharusnya juga turut menjaga dan mengupayakan perdamaian di kawasan Asia Pasifik. Meskipun upaya damai APPF tidak menjadi satu-satunya jalur diplomasi dalam penanganan isu keamanan di Semenanjung Korea, tetapi kehadiran diplomasi parlemen dalam kerangka upaya damai APPF ini memiliki arti strategis yang cukup penting dan tidak bisa dikesampingkan dalam mendukung upaya damai atas masalah keamanan di Semenanjung Korea. Dalam kerangka upaya damai itulah, APPF dengan jejaring antar-parlemen yang dimilikinya, mengajak parlemen negara-negara di kawasan, yang sesungguhnya juga aktif di APPF, untuk juga mempromosikan perdamaian di Semenanjung Korea.

Pemanfaatan jejaring antar-parlemen ini, antara lain, dilakukan APPF dengan membangun komunikasi dengan sejumlah parlemen negara-negara ASEAN, yang selama ini juga aktif di APPF, agar mereka juga menaruh perhatian pada persoalan keamanan di Semenanjung Korea. Komunikasi antar-parlemen ini terlihat, misalnya, pada saat pelaksanaan Sidang Umum ke-36 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di Kuala Lumpur, Malaysia, September 2015, di mana isu keamanan di Semenanjung Korea menjadi salah satu bahasan dalam forum dialog bilateral antara anggota parlemen negara-negara AIPA dengan mitra wicara parlemen negara-negara peninjau (*observer*) yang juga menjadi anggota APPF, di antaranya Korea Selatan, Jepang, dan China.⁴⁶ Melalui forum dialog tersebut, mereka membangun komitmen untuk ikut mengawal dan mendukung proses perdamaian di Semenanjung Korea. Komunikasi antar-parlemen ini juga dibangun di sela-sela pelaksanaan sidang APPF di Vancouver (Kanada), Januari 2016, di mana mereka

⁴⁶ "ASEAN parliamentarians tackle broad agenda", <http://vietnamnews.vn/print/203922/asean-parliamentarians-tackle-broad-agenda.htm> - diakses 18 Januari 2016. Lihat juga, *AIPA Newsletter*, September 2015.

kembali membangun komitmen untuk terus mempromosikan perdamaian di Semenanjung Korea dan juga mendukung upaya-upaya perbaikan hubungan antar-Korea.⁴⁷

Komunikasi yang dibangun di antara parlemen negara-negara APPF tersebut, sesungguhnya menjadi bagian penting dari upaya damai parlemen dalam mendukung penanganan masalah keamanan di Semenanjung Korea, dan hal tersebut juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya promosi damai di kawasan ini, setidaknya jaringan diplomasi dalam kerangka pencarian solusi damai atas masalah keamanan di Semenanjung Korea semakin meluas dengan kehadiran diplomasi parlemen yang diprakarsai APPF. Ini artinya, parlemen, dengan jalur dan jejaring diplomasi yang dimilikinya, telah ikut memperkuat komitmen politik masyarakat internasional untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan perdamaian di Semenanjung Korea. Diplomasi parlemen yang dibangun dan dikembangkan APPF, sudah tentu juga, bisa melengkapi aktivitas diplomasi antar-pemerintah negara-negara di kawasan. Karena di dalam diplomasi parlemen yang dijalankan APPF, para anggota parlemen juga membangun kesepakatan untuk mendukung dilanjutkannya upaya damai di Semenanjung Korea, sebagaimana yang dilakukan para diplomat pemerintah melalui forum perundingan enam pihak (yang kini terhenti) dan forum multilateral lainnya, di antaranya dengan terus mendukung upaya penguatan hubungan antar-Korea dan terciptanya denuklirisasi di Semenanjung Korea.

Dalam diplomasi parlemen, APPF juga menegaskan pentingnya para anggota parlemen secara individual, khususnya dari negara-negara anggota APPF, untuk juga melakukan aktivitas diplomasi guna mendukung upaya damai di Semenanjung Korea. Ini artinya, upaya damai parlemen yang dilakukan secara individual oleh anggota parlemen, dengan memanfaatkan jejaring dan keluwesan aktivitas diplomasi yang dimilikinya, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diplomasi parlemen dan upaya damai APPF atas masalah keamanan

⁴⁷ *APPF Newsletter*, Januari 2016.

di Semenanjung Korea. Upaya damai parlemen yang dilakukan secara individual oleh anggota parlemen negara-negara APPF memiliki arti penting bagi APPF, agar upaya APPF dalam mendukung pencarian solusi damai atas masalah keamanan di Semenanjung Korea dapat lebih maksimal. Upaya damai APPF tidak hanya dilakukan pada saat sidang tahunan APPF dengan resolusi-resolusi yang dihasilkannya, tetapi juga harus ditindaklanjuti oleh para anggota parlemen negara-negara APPF, di luar sidang tahunan APPF, melalui aktivitas diplomasi parlemen di tingkat bilateral maupun multilateral.

Upaya damai tersebut, antara lain, pernah dilakukan oleh anggota parlemen Jepang, Toshihiro Nikai. Dalam kerangka upaya damai tersebut, Nikai terlebih dahulu membangun komunikasi dengan presiden Korea Selatan, Park Geun-hye, ketika berkunjung ke Seoul pada bulan Februari 2015.⁴⁸ Dalam kunjungan ke Seoul, Nikai memiliki misi memperkuat kembali hubungan Jepang-Korea Selatan yang sempat menurun, tetapi kunjungan tersebut juga ia manfaatkan untuk membahas upaya damai di Semenanjung Korea. Nikai, dalam kesempatan itu, bahkan meminta pandangan Presiden Park perihal kemungkinan ia melakukan kunjungan ke Pyongyang guna bertemu dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, dalam kerangka upaya damai di Semenanjung Korea. Nikai hingga saat ini memang belum berkesempatan mengunjungi Pyongyang, tetapi keinginannya untuk berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea patut diapresiasi, dan menjadi bagian dari diplomasi parlemen dan upaya damai APPF.

⁴⁸ "Toshihiro Nikai a man to watch: Influential LDP politician has inside track with S. Korea", *The Asahi Shimbun*, 14 Februari 2015, <http://ajw.asahi.com/article/behind-the-news-politics/> - diakses 18 Januari 2016. Toshihiro Nikai adalah anggota parlemen senior Jepang dan ahli dalam diplomasi parlemen. Ia juga dikenal sebagai Ketua Liga Parlemen Jepang-Indonesia. Pada saat kunjungan delegasi Jepang ke Indonesia bulan November 2015, Toshihiro Nikai memperoleh Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko Widodo, karena telah berjasa meningkatkan hubungan Indonesia-Jepang.

APPF, dalam sidang tahunan di Vancouver (Kanada), Januari 2016, memang kembali menghimbau para anggota parlemen negara-negara APPF untuk aktif mendukung upaya damai atas masalah keamanan di Semenanjung Korea. Himbauan APPF didasari atas keprihatinan terhadap situasi keamanan di Semenanjung Korea yang tidak kondusif belakangan ini, yang semakin sering diwarnai oleh ketegangan, terutama sebagai akibat dari aksi uji coba nuklir Korea Utara, yang kemudian mendapat reaksi keras negara-negara tetangganya di kawasan. Keterlibatan anggota parlemen negara-negara APPF secara aktif dalam aktivitas diplomasi parlemen terkait penanganan masalah keamanan di Semenanjung Korea menjadi perhatian serius APPF belakangan ini. Bahkan, pernah muncul gagasan di kalangan anggota parlemen untuk membentuk "tim diplomasi", yang beranggotakan sejumlah anggota parlemen negara-negara APPF, yang nantinya akan ditugaskan secara khusus untuk melakukan komunikasi politik dengan parlemen Korea Utara guna membicarakan kemungkinan-kemungkinan diadakannya dialog antar-parlemen dalam kerangka pencarian solusi damai atas masalah keamanan di Semenanjung Korea, khususnya terkait penguatan hubungan Korea Utara dan Korea Selatan. Gagasan tersebut belum terealisasi, namun patut dicatat sebagai kesungguhan parlemen untuk menjadi bagian dari pencarian solusi damai atas masalah keamanan di Semenanjung Korea.

Sejumlah anggota parlemen negara-negara APPF, yang diinisiasi oleh anggota parlemen Kanada, menjelang pelaksanaan sidang tahunan APPF di Vancouver, Januari 2016, juga pernah menyampaikan pandangan tentang pentingnya anggota parlemen dilibatkan dalam penanganan isu-isu global, termasuk isu keamanan di Semenanjung Korea.⁴⁹ Dalam perspektif mereka, anggota parlemen memiliki kelebihan

⁴⁹ "Parliamentary Diplomacy, Canadian Parliamentarians and the World", *Canada's Library of Parliament*, 8 Desember 2015, <https://hillnotes.wordpress.com/2015/12/08/parliamentary-diplomacy-canadian-parliamentarians-and-the-world/> - diakses 19 Januari 2016.

dalam membangun komunikasi politik, karena pendekatan dialog yang dibangun tidak sekaku diplomat-diplomat pemerintah, begitu juga dengan gaya bahasa yang digunakan, sehingga memudahkan mereka (para anggota parlemen) untuk melakukan aktivitas diplomasi secara fleksibel dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Ini artinya, anggota parlemen, dalam aktivitas diplomasinya, selain menjalin komunikasi politik dengan sesama anggota parlemen, juga dapat melakukan komunikasi politik dengan pejabat-pejabat pemerintah dari negara lain dalam pencarian solusi damai atas masalah keamanan suatu kawasan. Dalam konteks masalah keamanan di Semenanjung Korea, hal tersebut terlihat antara lain dalam diplomasi yang dilakukan oleh anggota parlemen Jepang, Toshihiro Nikai, di atas. Anggota parlemen negara-negara APPF yang lain, dengan kapabilitas dan jejaring yang dimilikinya, juga perlu melakukan aktivitas diplomasi tersebut.

Aktivitas diplomasi yang dilakukan anggota parlemen, sejauh ini memang masih sebatas membangun komitmen di antara anggota parlemen negara-negara APPF untuk mendukung upaya pencarian solusi damai atas masalah keamanan di Semenanjung Korea. Aktivitas diplomasi parlemen itu pun sesungguhnya tidak mudah, terlebih jika hal itu dihadapkan pada upaya membangun komunikasi politik dengan parlemen Korea Utara, atau bahkan dengan rezim di Pyongyang, sebagai salah satu pihak yang sesungguhnya juga perlu diajak berbicara, jika diplomasi dalam upaya pencarian solusi damai atas masalah keamanan di Semenanjung Korea ingin berhasil sebagaimana yang diharapkan. Sebagaimana diketahui, rezim di Pyongyang yang otoriter dan tertutup telah mendominasi pelaksanaan pemerintahan di Korea Utara, dan hal ini membatasi parlemen Korea Utara untuk bersikap terbuka, termasuk dalam hal membangun komunikasi politik dengan mitra parlemen negara lain. Meskipun demikian, dalam kerangka diplomasi parlemen, upaya membangun komunikasi politik dengan

parlemen Korea Utara, bahkan dengan rezim Kim Jong-un yang otoriter, harus terus diupayakan sebagai konsekuensi logis dari dipilihnya diplomasi sebagai jalan utama dalam mengatasi masalah keamanan di Semenanjung Korea.

Upaya diplomasi parlemen tersebut bukannya tidak mungkin dilakukan, setidaknya hal itu pernah, dan tampaknya akan dicoba kembali, dilakukan oleh anggota parlemen kedua Korea (Korea Utara dan Korea Selatan). Anggota parlemen Korea Utara dan Korea Selatan, secara politis, adalah yang paling berkepentingan membangun dialog dalam kerangka diplomasi parlemen ini. Dalam catatan perjalanan hubungan antar-Korea, kedua anggota parlemen dari negara yang terpisah ini, memang pernah melakukan interaksi, dan hal itu terlihat, antara lain, dari pertemuan yang pernah dilakukan di antara mereka dalam kerangka mendukung program reunifikasi. Pertemuan kali pertama antar-anggota parlemen Korea tersebut terjadi pada 1985 di Desa Panmunjom, daerah perbatasan kedua negara, sebagai langkah awal kedua parlemen untuk membuka dialog. Saat itu suasana hubungan kedua negara relatif baik, setelah sebelumnya pada 1984 Korea Utara memberikan bantuan kepada Korea Selatan yang baru saja dilanda bencana banjir besar.⁵⁰ Sayangnya, komunikasi antar-anggota parlemen Korea ini selanjutnya tidak berjalan lancar, yang disebabkan oleh seringnya ketegangan mewarnai hubungan kedua negara. Memang tidak mudah membangun dialog di tengah-tengah masih kuatnya ketidakpercayaan di antara kedua Korea yang berpisah dan berbeda ideologi, dan secara teknis masih dalam keadaan “berperang” setelah Perang Korea 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.

Tampilnya Kim Dae-jung sebagai presiden Korea Selatan (1998-2003), dengan kebijakan *Sunshine Policy*-nya, kembali membuka ruang

⁵⁰ Victor D. Cha, “Korean Unification: The Zero-Sum Past and the Precarious Future”, *Asian Perspective*, Vol. 21, No. 3, 1997, hal. 63-92.

dialog di antara kedua negara Korea. Melalui *Sunshine Policy*, Kim Dae-jung mencoba untuk mengikutsertakan Korea Utara di dalam setiap kerja sama ekonomi, dan berusaha keras untuk lebih menciptakan suasana damai, rukun dan menuju kerja sama antar-negara Korea daripada hubungan yang tertekan dengan konflik. Dialog cukup intens pun terjadi di antara kedua negara untuk membangun kesepahaman, puncaknya adalah pertemuan bersejarah di antara kedua pemimpin Korea, Kim De-jung dan Kim Jong-il, yang berlangsung pada Juni 2000 di Pyongyang.⁵¹ Dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut, kedua pihak membicarakan kemungkinan-kemungkinan program kerja sama dan reunifikasi yang bisa dilakukan oleh kedua negara ke depan. Hubungan hangat kedua Korea berlanjut pada masa kepresidenan Roh Moo-hyun (2003-2007) yang menjalankan kebijakan yang hampir serupa dengan pendahulunya, Kim Dae-jung. Situasi yang cukup kondusif itu pun kemudian dimanfaatkan oleh parlemen kedua negara untuk kembali menjalin komunikasi yang lebih intens guna mendukung program reunifikasi Korea, yang antara lain ditandai dengan kunjungan delegasi parlemen Korea Utara ke parlemen Korea Selatan untuk pertama kalinya pada bulan Agustus 2005.⁵²

Momentum pertemuan antar-parlemen Korea tersebut telah memunculkan harapan dan keinginan dari kedua parlemen Korea untuk menyelenggarakan pertemuan puncak di antara mereka (*inter-Korean parliamentary summit*) sebagai bentuk kesungguhan parlemen dalam mendukung upaya damai di Semenanjung Korea. Namun, harapan dan keinginan tersebut memudar di masa kepresidenan Lee Myung-bak (2008-2013) di mana hubungan antar-Korea kembali dingin, terutama setelah kapal

korvet Cheonan milik Korea Selatan tenggelam pada 2010 yang diklaim Seoul telah ditorpedo oleh kapal selam Korea Utara. Dua tahun belakangan, keinginan untuk merealisasikan pertemuan puncak antar-parlemen Korea kembali mengemuka. Usulan itu datang dari Ketua Parlemen Korea Selatan (*Speaker of the National Assembly of South Korea*), Chung Ui-hwa, yang dikemukakannya sejak ia menjabat sebagai ketua parlemen pada Mei 2014.⁵³ Para ketua parlemen Korea Selatan sebelumnya juga pernah mengusulkan hal serupa, tetapi tidak mendapat respons dari Utara.

Chung Ui-hwa, yang kini menjabat sebagai ketua parlemen Korea Selatan, ingin menghidupkan kembali rencana pertemuan puncak antar-parlemen Korea dan sangat berharap rencana tersebut dapat direalisasikan di masa kepemimpinannya sebagai ketua parlemen. Chung Ui-hwa adalah seorang dokter sebelum masuk ke dunia politik pada 2006. Sejak menjadi anggota parlemen, Chung dikenal sangat aktif mendukung program reunifikasi, dan juga kerap menyuarakan pentingnya dialog antar-parlemen Korea dalam kerangka mendukung terwujudnya perdamaian di Semenanjung Korea. Salah satu bentuk kesungguhan Chung Ui-hwa, dan juga parlemen Korea Selatan dalam mendukung upaya perdamaian, adalah dengan mengusulkan rancangan undang-undang yang isinya memuat ketentuan bagi terjadinya kemudahan dalam kegiatan pertukaran antar-Korea. Rancangan undang-undang, yang diinisiasi oleh Chung Ui-hwa pada bulan Mei 2015 ini, mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan pertukaran medis dan meningkatkan bantuan pemerintah Korea Selatan kepada organisasi swasta yang memberikan bantuan medis kepada Korea Utara. Kesungguhan Chung Ui-hwa untuk lebih mendekatkan hubungan antar-Korea juga dilakukan dengan membuat surat kepada ketua parlemen Korea Utara, Choi Tae-

⁵¹ Michael Breen, "Inter-Korean summit and years of Sunshine policy", *The Korea Times*, 20 Juni 2010, http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2010/06/116_67970.html - diakses 20 Januari 2016.

⁵² Do Je-hae, "National Assembly eyes peace-making role", *The Korea Times*, 1 November 2015, www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2015/11/116 - diakses 20 Januari 2016.

⁵³ "Assembly Speaker considers inter-Korean parliamentary talks", *The Korea Herald*, 12 Juli 2015, <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20150712000155> - diakses 20 Januari 2016.

bok, perihal usulan pertemuan puncak antar-parlemen Korea.⁵⁴

Memang tidak mudah bagi parlemen Korea Selatan mengajak parlemen Korea Utara untuk bertemu dan membicarakan upaya perdamaian di tengah-tengah perbedaan ideologi dan sistem politik di kedua negara serta ketegangan yang kerap terjadi di kawasan Semenanjung Korea. Meskipun demikian, upaya yang dilakukan oleh parlemen Korea Selatan untuk mendekatkan hubungan antar-Korea dan mengajak dialog mitranya dari Utara, patut dicatat sebagai langkah konstruktif untuk mendukung tercapainya solusi damai atas masalah keamanan di Semenanjung Korea. Berdasarkan catatan hubungan antar-parlemen Korea di atas, terlihat bahwa mereka pernah bertemu pada 1985 dan 2005, dan tidak tertutup kemungkinan mereka akan bertemu lagi melalui pertemuan puncak antar-parlemen Korea, sebagaimana yang diusulkan ketua parlemen Korea Selatan, Chung Ui-hwa, guna membicarakan langkah-langkah konkret untuk mendukung upaya terwujudnya perdamaian di Semenanjung Korea. Upaya damai yang diinisiasi Ketua Parlemen Korea Selatan tersebut sesungguhnya juga tidak dapat dipisahkan dari upaya damai APPF, di mana organisasi antar-parlemen di kawasan Asia Pasifik ini, senantiasa mendorong anggotanya (parlemen negara-negara APPF) untuk aktif melakukan diplomasi parlemen dalam kerangka pencarian solusi damai atas masalah keamanan di Semenanjung Korea.

Berdasarkan pembahasan di atas terlihat bahwa masalah keamanan di Semenanjung Korea telah menjadi salah satu isu internasional yang menarik perhatian anggota parlemen negara-negara di kawasan, tidak saja menjadi isu dalam pertemuan-pertemuan tingkat pemerintah antar-negara. Ini artinya, isu keamanan di Semenanjung Korea sudah selayaknya mendapatkan perhatian parlemen, karena ini berkaitan dengan keamanan masyarakat, khususnya masyarakat kawasan. Parlemen, sebagai salah satu aktor hubungan internasional di luar pemerintah, dan dalam

kerangka *network diplomacy*, dapat berpartisipasi dalam aktivitas diplomasi untuk mendukung atau memperkuat langkah-langkah diplomasi pemerintah, diantaranya dengan membangun komunikasi dan interaksi di antara sesama anggota parlemen, yang bertujuan tidak saja untuk memperkuat hubungan kerja sama antar-parlemen dan antar-negara, tetapi juga untuk mendukung upaya penanganan masalah keamanan kawasan yang menjadi perhatian masyarakat internasional.

Ini juga menunjukkan, bahwa parlemen, selain memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sebagai aktor hubungan internasional juga memiliki fungsi diplomasi dalam kerangka berperanserta untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Parlemen dapat memainkan peranannya dalam hubungan internasional, baik itu dalam konteks individual sebagai anggota parlemen maupun secara kelembagaan melalui partisipasi parlemen nasional di forum-forum antar-parlemen, untuk memperkuat terwujudnya hubungan internasional yang bersifat kooperatif daripada konfliktual dan terciptanya iklim kondusif di berbagai kawasan dunia. Diplomasi parlemen semacam inilah yang sesungguhnya juga telah dan perlu terus dilakukan APPF dalam merespons situasi keamanan di Semenanjung Korea, di mana telah hadir aktivitas negara-negara dengan *power*-nya, yang mengandung potensi konflik dan bisa mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan. APPF, sebagai forum antar-parlemen yang menaruh perhatian pada isu keamanan di Semenanjung Korea, perlu meningkatkan aktivitas diplomasinya, secara kelembagaan maupun individual anggota parlemen, untuk mendukung upaya damai atas masalah keamanan di kawasan tersebut.

Keterlibatan parlemen dalam upaya damai tersebut, sebagaimana telah dikemukakan dalam kerangka analisis di atas, adalah sejalan dengan tuntutan dan tantangan diplomasi yang semakin kompleks dalam hubungan internasional, di mana dalam menghadapinya tidak cukup bergantung kepada diplomat-diplomat pemerintah, tetapi juga perlu

⁵⁴ *Ibid.*

melibatkan aktor-aktor non-pemerintah, yang bertujuan untuk mendukung atau memperkuat langkah diplomasi pemerintah, diantaranya yang berkaitan dengan upaya perdamaian dan resolusi konflik. Ini artinya, sekedar untuk menegaskan kembali, parlemen harus peduli pada upaya pencarian solusi damai atas persoalan keamanan kawasan dan terciptanya stabilitas keamanan di suatu kawasan. Terciptanya stabilitas keamanan di suatu kawasan akan berkontribusi bagi upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Upaya damai parlemen ini, sebagaimana telah dikemukakan di atas, juga tidak dapat dilepaskan dari kedudukannya sebagai lembaga perwakilan rakyat, dan juga sebagai aktor hubungan internasional, yang memang sudah seharusnya memberi perhatian dan menaruh prihatin atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk masyarakat internasional. Hal ini menjadi tantangan parlemen dalam kapasitasnya sebagai aktor hubungan internasional, sebagaimana juga telah dikemukakan di atas, yang sudah seharusnya juga mengambil peran dalam upaya pencarian solusi damai atas masalah keamanan di Semenanjung Korea melalui diplomasi parlemen. Diplomasi parlemen dapat menjadi bagian yang melengkapi diplomasi pemerintah dalam penanganan masalah keamanan di Semenanjung Korea. Melalui jejaring diplomasi yang dimilikinya parlemen dapat memainkan peranannya, baik itu dalam konteks individual sebagai anggota parlemen maupun secara kelembagaan melalui forum antar-parlemen.

G. Kesimpulan

Masalah keamanan kawasan yang belum terlihat solusi damainya menjadi keprihatinan masyarakat internasional, mengingat implikasinya terhadap stabilitas kawasan. Semenanjung Korea merupakan salah satu kawasan yang hingga kini masih menghadapi persoalan keamanan sebagai akibat dari belum dicapainya kesepakatan damai antara Korea Utara dan Korea Selatan,

dan isu nuklir Korea Utara yang menimbulkan kekhawatiran internasional, khususnya negara-negara di kawasan. Berbagai upaya damai telah dilakukan untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi damai atas masalah keamanan di Semenanjung Korea, namun upaya damai tersebut belum membuahkan hasil karena ketidakpercayaan masih kuat menghinggapi para pihak yang saling “berlawanan” (Korea Utara versus Korea Selatan, dan Korea Utara versus Amerika Serikat). Tidak mengherankan jika kemudian aktivitas propaganda dan retorika bernada permusuhan di antara pihak yang saling berlawanan terus berlangsung, termasuk aktivitas manuver militer, sebagaimana yang terjadi belakangan ini. Kemungkinan pecah perang baru pun menjadi kekhawatiran internasional.

Parlemen, sebagai aktor hubungan internasional dan dalam kerangka diplomasi berjejaring, dapat menjadi bagian dari upaya pencarian solusi damai atas masalah keamanan kawasan, termasuk masalah keamanan di Semenanjung Korea yang belakangan ini kembali memanas dan menyita perhatian internasional. Keterlibatan parlemen dalam upaya damai atas persoalan keamanan kawasan tersebut dilakukan melalui aktivitas diplomasi parlemen, terutama melalui APPF sebagai forum antar-parlemen yang menaruh perhatian serius pada isu keamanan di Semenanjung Korea. APPF, melalui sidang-sidang tahunannya telah mengeluarkan sejumlah resolusi terkait isu keamanan di Semenanjung Korea, dan anggota parlemen dari sejumlah negara APPF pun, melalui jejaring yang dimilikinya, telah berusaha melakukan diplomasi parlemen dalam kerangka mendukung upaya damai atas masalah keamanan di Semenanjung Korea.

Tidak mudah bagi parlemen untuk melakukan aktivitas diplomasi dalam kerangka pencarian solusi damai atas masalah keamanan kawasan tersebut, mengingat kompleksitas permasalahannya, termasuk ketika parlemen negara-negara APPF, diantaranya parlemen Korea Selatan, dihadapkan pada upaya membangun komunikasi politik dengan

parlemen Korea Utara yang tertutup dan di bawah pengaruh rezim Pyongyang yang otoriter. Meskipun demikian, diplomasi parlemen harus tetap menjadi bagian dari upaya pencarian solusi damai atas masalah keamanan di Semenanjung Korea, sepertinya halnya yang dilakukan APPF, baik secara kelembagaan maupun individual anggota parlemen. Upaya damai parlemen memang tidak ditujukan untuk mengatasi secara langsung persoalan keamanan kawasan tersebut, tetapi lebih ditujukan pada upaya untuk mendukung dan melengkapi diplomasi yang selama ini dijalankan pihak pemerintah (eksekutif).

Upaya damai parlemen juga sebagai bagian dari dipilihnya diplomasi sebagai jalan utama dalam mengatasi masalah keamanan di Semenanjung Korea. APPF, sebagai aktor hubungan internasional, dan yang selama ini menaruh perhatian pada masalah keamanan di Semenanjung Korea, harus meningkatkan aktivitas diplomasinya dalam kerangka upaya damai di kawasan tersebut. Aktivitas diplomasi APPF tidak cukup dilakukan hanya pada saat pelaksanaan sidang tahunan APPF, tetapi harus ditindaklanjuti oleh aktivitas diplomasi anggota parlemen negara-negara APPF, melalui jejaring yang dimilikinya, di tingkat bilateral dan multilateral. Upaya damai parlemen tersebut adalah sejalan dengan tuntutan dan tantangan diplomasi yang semakin kompleks dalam hubungan internasional, di mana dalam menghadapinya tidak cukup bergantung kepada diplomat-diplomat pemerintah. Ini artinya, dalam tatanan dunia yang semakin global, diplomasi parlemen telah menjadi salah satu faktor penting yang memberikan alternatif dalam praktik diplomasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- BKSAP, *Diplomasi DPR: Dari Senayan ke Kancah Global*, BKSAP-DPR RI, 2009.
- Diamond, Louise, *Multi-Track Diplomacy: A System Approach to Peace*, Bloomfield, USA: Kumarin Press, Inc., 2002.
- Djelantik, Sukawarsini, *Diplomasi antara Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Cha, Victor D., "Korean Unification: The Zero-Sum Past and the Precarious Future", *Asian Perspective*, Vol. 21, No. 3, 1997.
- Cumings, Bruce, *The Korean War: A History*, Modern Library Paperback Edition, 2011.
- Heine, Jorge, "From Club to Network Diplomacy", dalam Andrew F. Cooper, Jorge Heine, and Ramesh Thakur, *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy*, Oxford: Oxford University Press, 2013, hal. 54-69.
- Il-su, Kim, "Kim Jong-il and Denuclearization of the Korean Peninsula", dalam Tae-Hwan Kwak and Seung-Ho Joo (eds), *North Korea's Foreign Policy Under Kim Jong-il*, Ashgate Publishing Company, 2009.
- Lynn, Hyung Gu, *Bipolar Orders: The Two Koreas Since 1989*, Canada: Fernwood Publishing, 2007.
- Oberdorfer, Don and Robert Carlin, *The Two Koreas*, New York: Publisher Basic Books, 2014.
- Roberston, Jeffrey, "North Korean Nuclear Issue and the Role of Parliamentary Diplomacy", *Research Note No. 23*, Australia: Parliamentary Library, 2007.
- Spiegel, Steven L., *World Politics in A New Era*, Oxford University Press, 2012.
- Walter C., Jr, Clement, Jr., "North Korea's Quest for Nuclear Weapons: New Historical Evidence", *Journal of East Asian Studies*, Vol. 10, No. 1, Januari-April 2010.

Weisglas, Frans W. and Gonnig de Boer, "Parliamentary Diplomacy", *The Hague Journal of Diplomacy* 2, 2007.

Koran/Surat Kabar

"Korea Utara Umumkan Sukses Uji Coba Bom Hidrogen", *Kompas*, 6 Januari 2016.

"Korut Produksi Nuklir Mini", *Kompas*, 10 Maret 2016.

"North Korea's nuclear test strongly opposed: China", *The Jakarta Post*, 7 Januari 2016.

"North Korea says nuclear test shows it could 'wipe out' US", *The Jakarta Post*, 14 Januari, 2016.

"UN sanctions North Koreans for missile, nuclear programs", *The Jakarta Post*, 3 Maret 2016.

"North Korea again threatens nuke strikes on US, South Korea", *The Jakarta post*, 7 Maret 2016.

Park Hyung-sik, "Parliamentary diplomacy and Korean Peninsula stabilities", *The Jakarta Post*, 16 Januari 2015.

"S Korea to resume propaganda war with North after mine blasts", *The Jakarta Post*, 10 Agustus 2015.

"S. Korea shells North after rocket attack", *The Jakarta Post*, 20 Agustus 2015.

"Tension flare again between two Koreas", *The Jakarta Post*, 11 Agustus 2015.

Portal

Andres Malamud and Stelios Stavridis, "Parliaments and Parliamentarians as International Actors", *Ashgate Publishing Ltd.*, www.apps.evi.eu/Personal/Researchers/malamud/Ashgate-Malamud-Stavridis.pdf - diakses 26 Februari 2016.

"ASEAN parliamentarians tackle broad agenda", <http://vietnamnews.vn/print/203922/asean-parliamentarians-tackle-broad-agenda.htm> - diakses 18 Januari 2016.

"Asia Pacific Parliamentary Forum: Annual Meetings", www.appf.org.pe/ - diakses 18 Januari 2016.

"Assembly Speaker considers inter-Korean parliamentary talks", *The Korea Herald*, 12 Juli 2015, <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20150712000155> - diakses 20 Januari 2016.

"Diplomacy, cooperative security and disarmament", *Parliamentarians for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament (PNND)*, 10 Januari 2016, www.pnnd.org/article/diplomacy-cooperative-security-and-disarmament - diakses 18 Januari 2016.

Do Je-hae, "National Assembly eyes peace-making role", *The Korea Times*, 1 November 2015, www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2015/11/116 - diakses 20 Januari 2016.

"IPU Assembly Resolutions", www.ipu.org/strct-e/stcnfres.htm/#132 - diakses 18 Januari 2016.

"Kim Jong-un orders North Korean frontline troops onto war footing", *The Telegraph*, 21 Agustus 2015, www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/ - diakses 7 Januari 2016.

"Mengenal Bom Hidrogen Korut, Kekuatan 25 Ribu Kali Bom Hiroshima", *Sindonews.com*, 6 Januari 2016, <http://international.sindonews.com/read/1074877/45/mengenal-bom-hidrogen-korut-kekuatan-25-ribu-kali-bom-hiroshima-1452074062> - diakses 8 Januari 2016.

Michael Breen, "Inter-Korean summit and years of Sunshine policy", *The Korea Times*, 20 Juni 2010, http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2010/06/116_67970.html - diakses 20 Januari 2016.

"North Korea fire missile over Japan", *The Guardian*, 1 September 1998, www.theguardian.com/world/1998/sep/01/northkorea - diakses 6 Januari 2016.

- “North Korea says it has a program on nuclear arms”, *The New York Times*, 17 Oktober 2002, www.nytimes.com/2002/10/17/world/ - diakses 6 Januari 2016.
- “North Koreans Launch Rocket Over the Pacific”, *The New York Times*, 4 April 2009, www.nytimes.com/2009/04/05/world/ - diakses 7 Januari 2016.
- “North Korean torpedo sank Cheonan, South Korea military source claims”, *The Guardian*, 22 April 2010, <http://www.theguardian.com/world/2010/apr/22/north-korea-cheonan-sinking-torpedo> - diakses 20 Januari 2016.
- “North Korea rocket launch raises nuclear stakes”, *Reuters*, 12 Desember 2012, www.reuters.com/article/us-korea-north-rocket/ - diakses 7 Januari 2016.
- “North Korea fires three short-range missiles into eastern waters”, *The Guardian*, 18 Mei 2013, www.theguardian.com/world/2013/may/18/north-korea-fires-scud-missile - diakses 7 Januari 2016.
- “Parliamentarians and the North Korean nuclear test”, *Parliamentarians for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament (PNND)*, 10 Januari 2016, www.pnnd.org/article/parliamentarians-and-north-korean-nuclear-test - diakses 18 Januari 2016.
- “The Six Party Talks on North Korea’s Nuclear”, *Council on Foreign Relations*, 30 September 2013, www.cfr.org/proliferation/six-party-talks-north-koreas-nuclear-program/ - diakses 7 Januari 2016.
- “Toshihiro Nikai a man to watch: Influential LDP politician has inside track with S. Korea”, *The Asahi Shimbun*, 14 Februari 2015, <http://ajw.asahi.com/article/behind-the-news-politics/> - diakses 18 Januari 2016.